Analisis Kemandirian Fiskal Dan Pembangunan Ekonomi 38 Kabupaten Atau Kota di Jawa Timur (Periode 2010-2014)

Ryanda Alwindi, [1]
Dwi Budi Santoso [2]

[1] *Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*
[2] *Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*

Alamat Korespondensi: [1] *ryanda.alwindi@gmail.com*

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu wujud pembangunan ekonomi suatu daerah, kuatnya kemandiran fiskal menjukkan kuatnya suatu daerah dalam membiayai daerahnya sendiri melalui PAD, agar daerah tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan daerah. PAD yang merupakan gambaran dari Kemandirian Fiskal inilah yang nanti nya akan digunakan untuk Pembiyaan Pembangunan daerah. Karena PAD merupakan komposisi dari Pajak dan retribusi dapat digunakan untuk Pembangunan Daerah. Penelitian ini menganalisa pengaruh Pembangunan Ekonomi yang melalui 3 indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Kemandirian Fiskal di 38 Kabupaten atau Kota Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik analisis menggunakan analisis regresi data panel. Variabel dependen yang diteliti adalah Kemandirian Fiskal, sedangkan variabel independen yang diteliti adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan. Terdapat variabel dummy yang digunakan untuk menunjukkan tahun pada penelitian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Kemandirian Fiskal.

Kata Kunci: PAD, Kemandirian Fiskal, Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah merubah pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan daerahnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disisi lain memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengelola

rumah tangga merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi.Desentralisasi fiskal merupakan salah satu wujud pembangunan ekonomi suatu daerah karena kuatnya kemandiran fiskal menunjukkan kuatnya suatu daerah dalam membiayai daerahnya sendiri melalui PAD, agar daerah tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan daeranya sendiri.

Sebagai salah satu contoh penyelenggaraan otonomi daerah adalah Provinsi Jawa Timur yang memiliki 38 daerah Kabupaten atau Kota, dan sebagai kontribusi kedua terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia namun daerah Jawa Timur masih rendah tingkat kemandirian Fiskal dibandingkan daerah daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia.

Gambar 1 : Jumlah PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di JawaTimur

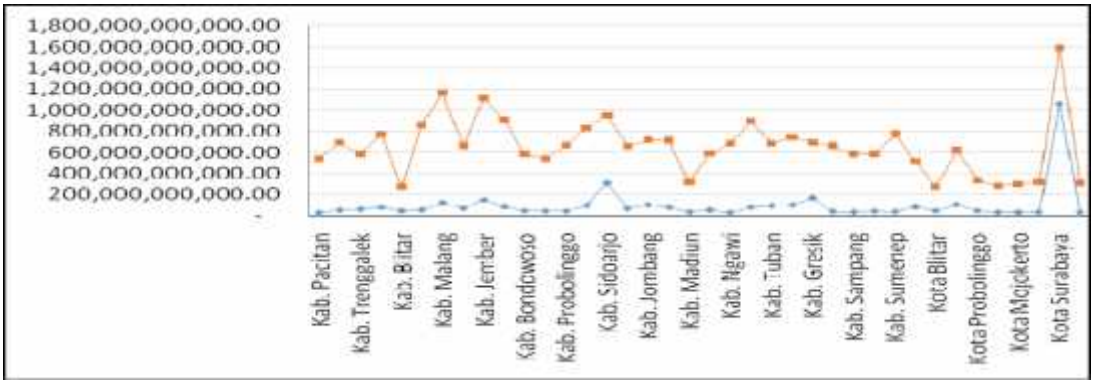

Sumber: data diolah. 2017

Dari grafik diatas terlihat ketimpangan antara 38 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur seperti daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bondowoso yang memiliki rata-rata perkapita rendah di banding Kabupaten dan Kota lainnya yang ada di Jawa Timur

Gambar 2 : Rata- rata Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Sumber: data diolah. 2017

Grafik diatas menjelaskan bahwa rata-rata dalam periode 5 tahun 38 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur tiap tahunnya pendapatan asli daerah (PAD) dan

dana perimbangan juga selalu mengalami peningkatan. Namun peningkatan ini tidak lebih dari 10% dan ini juga menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah Kabupaten maupun Kota di Jawa Timur yang ditunjukkan dengan besar nya tingkat dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas menarik untuk melihat pengaruh Pembangunan Ekonomi terhadap Kemandirian Fiskal pada 38 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur periode 2010-2014. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan maupun informasi untuk berbagai pihak. Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih mandiri untuk meningkatan pembangunan ekonomi Bagi pembaca dapat digunakan sebagai gambaran sejauh mana perkembangan kemandirian fiskal di 38 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Penerimaan Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan UU No. 28 Tahun 2009, Total Pendapatan Daerah (TPD) diperinci sebagai berikut yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, retribusi daerah. Hasil Perusahaan Milik Daerah, merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset Negara dan jasa giro.

Selain pendapatan Asli Daerah sumber pendapatan daerah juga ditopang oleh sumber-sumber pendapatan transfer atau bisa disebut juga sebagai bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi seperti Dana Perimbangan yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan transfer Pemerintah Pusat lainnya yang terdiri dari dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

Kemandirian Keuangan Daerah atau Kemandirian Fiskal

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah mengenai pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan

daerah serta jenis dan besaran belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan dan kemandirian daerah (Yuliati, 2001).

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemandirian daerah (dari sisi keuangan) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Rasio kemandirian:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP*) atau *Gross National Product (GNP*) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad,1999).

Menurut Malthus, *Ekonomi Pembangunan*; dalam Halim, (2002) keberhasilan pembangunan sebuah perekonomian adalah kesejahteraan negara. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi produksi disektor-sektor tersebut, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi di sini ialah tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Faktor non ekonomi ialah keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, kerja keras masyarakat dan disiplin, serta sikap jujur. Kedua faktor tersebut harus berjalan secara proposional supaya dapat meningkatkan sektor pertanian dan industri dan pada akhirnya meningkatkan GNP potensial (Jhingan,M.L.2012).

Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (Putong, 2003). Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya

mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Kemiskinan

Dalam kemandirian fiskal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi selain pertumbuhan ekonomi terdapat juga kemiskinan yang mempengaruhi dari kemandirian fiskal. Kemiskinan itu sendiri juga memiliki arti sebagai menurut Lipsey (Permata, 2011) mendefinisikan sebagai ketiadaan konsumsi dalam jumlah minimum, rumah, dan pakaian yang dibutuhkan dalam mempertahankan diri untuk hidup. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Penyebab kemiskinan antara lain karena keterbatasan pengetahuan, alokasi sumber daya yang sedikit, tingkat kemajuan teknologi yang terlalu cepat, dan kondisi perekonomian yang fluktuasi (Arsyad, 2004).

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemandirian Fiskal

Kebijakan desentralisasi fiskal berdampak positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya akan kekayaan alam dari pada daerah yang bukan pusat bisnis. Otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal pada umumnya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah karena pemberian wewenang yang lebih luas diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sehingga memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan perkapita (Waluyo, 2007). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga diharapkan meningkat pendapatan masyarakat dan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Berkaitan dengan pajak daerah atau yang biasa disebut pajak yang memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, (Musgrave, 1991) menyatakan bahwa ada tiga dasar basis pemungutan pajak pusat dan daerah. Dasar basis pemungutan pajak tersebut meliputi pajak daerah maupun pajak pusat yang berbasis pendapatan dan perusahaan (*income and corporate*), konsumsi (*comsumption*), dan kekayaan (*wealth*). Berdasarkan pendapat Fisher tersebut, maka pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame serta pajak penerangan jalan dikategorikan pajak daerah yang berbasis konsumsi.

Hubungan Pengangguran dan Kemiskinan dengan Kemandirian Fiskal

Menurut Zulyanto (2010) menyatakan bahwa dalam desentralisasi fiskal besarnya transfer dana di daerah dapat memiliki hubungan positif terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dapat mendorong pendapatan perkapita di daerah sehingga dapat mengurangi penduduk miskin dan sebaliknya rendahnya pendapatan perkapita akan menambah jumlah penduduk miskin. Dengan berkurangnya pengangguran dan kemiskinan juga bedampak pada pendapatan masyarakat. Diharapkan dengan adanya pendapatan dari masyarakat masyarakat dapat membayar pajak atau konsumsi masyarakat yang berdampak pada pajak atau retribusi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan sebagai bahan referensi dan berguna sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Ardi Hamzah, 2008 yang berjudul: *"Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskian (Studi pada 29 kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur)"*. Pendekatan yang di gunakan peneliti adalah pendekatan analisis jalur dan hasil dari penelitian Ardi Hamzah, 2008 menunjukan hasil pengujian secara langsung antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukan rasio kemandirian 1, rasio kemandirian 2, dan rasio efesiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan hasil lainnya menunjukan kinerja keuangan dengan pengangguran dan kemiskinan menunjukkan rasio kemandirian 1, rasio kemandirian 2, dan rasio efesien secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Faishal Fadly, 2016 yang berjudul "*Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah?"*. Peneltian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan data time series dari tahun 2000 – 2006, penelitian didaerah Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian tidak ada yang signifikan dari hasil regresi. Ini berarti bahwa peningkatan atau penurunan pada jumlah produk domestik regional bruto tidak memiliki efek pada pendapatan dari Provinsi JawaTimur. Dalam upaya mengurangi ketergantungan pada daerah pemerintah pusat dalam hal keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan, hal-hal menarik yang bisa dilakukan adalah adanya sebuah stimulator aktor untuk meningkatkan pendapatan, misalnya dengan membentuk badan usaha atau perusahaan lokal yang mengelola sistem bisnis yang dimungkinkan oleh Provinsi Jawa Timur Pemerintah diandalkan sebagai sumber pendapatan.

Dari yang telah disimpulkan diatas Pembangunan Ekonomi yang di ukur dari tiga indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan dapat memberikan

dampak terhadap pendapatan masyarakat. Dengan meningkat atau menurunnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi ini lah yang pada akhirnya akan memperkuat atau tidaknya terhadap kemandirian fiskal daerah atau meningkat nya pendapatan asli daerah. Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka rumusan hipotesis dari penelitian ini adalah diduga Pembangunan ekonomi yang diukur dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif ,sampel data 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur pada tahun 2010-2014 dan menggunakan teknik analisis regresi data panel.

Model Persamaan

Berikut model data panel yang akan digunakan dalam proses analisis data menggunakan Eviews 9.0, Maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 D_{1it} + \beta_5 D_{2it} + \beta_6 D_{3it} + \beta_7 D_{4it} + e_{it}$

Y : Kemandirian Fiskal, X_1 : Pertumbuhan ekonomi ,X_2 : Tigkat Kemiskinan, X_3 : Tingkat Pengangguran, D_1: h1 = tahun 2011, h0 = tahun lainnya, D_2 : h1 = tahun 2012, h0 = tahun lainnya, D_3 : h1 = tahun 2013, h0 = tahun lainnya, D_4 : h1 = tahun 2014, h0 = tahun lainnya, e : variabelpengganggu/residual (*error term*) i : Observasi (Provinsi) , t : Waktu (Tahun), β_0 : konstanta. $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$,: Koefisien masing-masing variabel independen Persamaan linear digunakan apabila dari diagram sebenarnya menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen secara diagonal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil regresi linear berganda

Untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan sebelum nya dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menjelaskan pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran terhadap kemandirian fiskal.Berikut hasil estimasi regresi linear berganda:

Tabel 1 : Hasil regresi linear berganda

Dependent Variable: KF		
Method: Panel Least Squares		
Date: 03/28/17 Time: 20:19		
Sample: 2010 2014		

Periods included: 5				
Cross-sections included: 38				
Total panel (balanced) observations: 190				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TK	-0.363713	0.109337	-3.326538	0.0011
PE	0.794249	0.381669	2.080991	0.0388
TPT	1.116438	0.358478	3.114387	0.0021
D1	1.965783	1.630969	1.205285	0.2297
D2	2.429079	1.635885	1.484871	0.1393
D3	3.282065	1.643208	1.997352	0.0473
D4	4.117703	1.692228	2.433303	0.0159
C	3.935585	4.322734	0.910439	0.3638
Adjusted R-squared	0.214112	S.D. dependent var		7.931478
S.E. of regression	7.031281	Akaike info criterion		6.779808
Sum squared resid	8997.883	Schwarz criterion		6.916525
Log likelihood	-636.0818	Hannan-Quinn criter.		6.835190
F-statistic	8.356042	Durbin-Watson stat		0.222858
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olahan EViews 9.0, 2017

Berikut hasil estimasi model regresi berganda:

$$Y_{it} = 3.935585\,C_{it} + 0.794249\,PE_{it} - 0.363713\,TK_{it} + 1.116438TP_{it} + 1.965783D_{1it} + 2.429079D_{2it} + 3.282065\,D_{3t} + 4.117703\,D_{4it} + \varepsilon_i$$

Hasil Uji T-Statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Uji t-statistik pada regresi berganda memiliki derajat *degree of freedom* (df) yang bergantung pada jumlah variabel independen ditambah dengan konstanta. Didapat hasil pengujian terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) yaitu koefisien variabel dari PE adalah 0.794249 dan t-hitung sebesar 2.080991 sedangkan probabilitasnya yaitu 0.0388 (≤5%) artinya peningkatan PE 1% maka akan meningkatkan KF sebesar 0.794249. Secara statistik menunjukkan bahwa variabel PE berpengaruh terhadap variabel KF.Itu artinya menolak H1. Pengujian terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) Koefisien variable TK adalah sebesar -0.363713 dan t-hitung -3.326538 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0011 (≤5%), sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel TK berpengaruh negatif terhadap variabel KF.Jadi apabila Tingkat Kemiskinan naik sebesar 1% maka KF menurun -0.363713. Itu artinya menerima H1. Pengujian terhadap Tingkat Pengangguran (TP) Koefisien variabel dari TP adalah sebesar 1.116438 dan t-hitung 3.114387 sedangkan probabilitasnya yaitu 0.0021(≤5%), sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel TP berpengaruh positif terhadap variabel KF, jadi apabila Tingkat Pengangguran naik sebesar 1% maka KF naik sebesar 1.116438. Berdasarkan hipotesis berarti menerima H0.

Pengujian variabel dummy pada tahun 2011 dan 2012 tidak berpengaruh signifikan, sementara pada tahun 2013 dan 2014 variabel dummy berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal, artinya D1 dan D2 tidak signifikan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kemandirian fiskal pada tahun 2011 dan 2012 dibandingkan dengan tahun 2010, sedangkan D3 dan D4 , signifikan menunjukkan kemandirian fiskal pada tahun tersebut tahun 2012 dan 2013 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 dan 2012 . Artinya pada tahun tersebut terdapat hal lain yang mempengaruhi pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap kemandirian fiskal.

Uji F-statistik

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak. F-hitung (F-statistik) dalam perhitungan menggunakan E-views 9.0 sebesar 8.356042 dan probabilitasnya sebesar 0.000000 (≤5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Pada model estimasi memperolah R^2 sebesar 0.2432sehingga variasi kemandirian fiskal dapat di jelaskan oleh variabel dependen dan variabel dummy sebesar 24,32 % dan sisanya di jelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Kemandirian fiskal

Hasil estimasi menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Kemandirian Fiskal, hasil penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adi (2006) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten/Kota di pulau Jawa dan Bali. Sementara itu studi Sardi (2016) menyebutkan bahwa kemampuan kabupaten Konawe Utara akan didorong oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, semakin besar peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan mendorong peningkatan PAD yang lebih besar. Berikut pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi Jawa Timur.

Tabel 2 : Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010-2014

Tahun	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	PDRB (%)
2010	340.613	6.28

2011	365.151	6.13
2012	391.864	6.22
2013	417.613	6.03
2014	1.539.795	5.59
Total	**378.810**	**6.05**

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

*Data 2010-2013 Atas Dasar Harga Konstan 2000

*Data 2014 Atas Dasar Harga Konstan 2010

Bedasarkan tabel diatas, PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya terjadi peningkatan, dari tahun 2010 sampai tahun 2014 peningkatan tersebut terus terjadi. Pemerintah daerah telah menjalankan fungsinya untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan mencapai keberhasilan, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi secara rill dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian setiap daerah untuk membiayai pembangunan.

Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kemandirian fiskal

Berdasarkan hasil estimasi model regresi berganda diketahui bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian fiskal dengan koefisien -0.363713, artinya setiap peningkatan Kemiskinan 1% maka akan menurunkan Kemandirian fiskal -0.363713 begitu sebaliknya, artinya hasil estimasi sesuai dengan hipotesis. Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan studi yang telah dilakukan Zulyanto (2010) yang menyebutkan bahwa Desentralisasi fiskal dapat mendorong pendapatan perkapita di daerah sehingga dapat mengurangi penduduk miskin dan sebaliknya rendahnya pendapatan perkapita akan menambah jumlah penduduk miskin. Berkurangnya jumlah penduduk miskin memiliki hubungan timbal balik terhadap kemandirian fiskal di daerah.

Tabel 3 : Rata-rata Kemiskinan dan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010-2014

Tahun	Penduduk miskin (ribu jiwa)	Penduduk miskin (%)	Kemandirian Fiskal (%)
2010	146.645	14.84	8.59
2011	137.547	13.82	10.37
2012	131.395	13.08	11.27
2013	128.763	12.72	12.23
2014	124.955	12.1	12.81
Total	**133.861**	**13.31**	**11.05**

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun 2010-2014 terjadi penurunan yang diikuti dengan peningkatan Kemandirian Fiskal. Sidik (2000) menyebutkan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak diukur dari nominal yang terus meningkat, tetapi diukur dari perannya untuk meningkatkan prekonomian masyarakat sehingga dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat disetiap daerah dalam rangka menanggulangi kemiskinan.

Pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemandirian fiskal

Hasil estimasi dari regresi linear berganda menyebutkan bahwa Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal. Hasil tersebut menolak hipotesis yang telah disusun yang menyebutkan bahwa pengangguran berpengaruh negarif terhadap kemandirian fiskal. Pengaruh positif yang terjadi karena karakteristik pengangguran di jawa timur adalah bersifat temporer dimana secara sukarela menganggur untuk menunggu atau mencari pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi, peningkatan pengangguran tersebut tidak menurunkan tingkat pendapatan masyarakat yang berarti tidak mengurangi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sehingga tingkat kemandirian fiskal tidak menurun. Karena tidak ada jaminan sosial pengangguran terbuka maka hanya angkatan kerja yang berasal dari keluarga mampu yang berani menganggur, karena mereka yang menganggur masih menerima subsidi dari keluarga, sepanjang subsidi itu masih tersedia, maka pilihan untuk menganggur akan terus terjadi. (Manning dkk 1985).

Oleh karena itu, Kemandirian fiskal yang terjadi di Kabupaten atau Kota di Jawa Timur terus meningkat meskipun terjadi peningkatan pengangguran, masyarakat Jawa Timur yang yang secara sosial juga tidak suka menganggur atau tidak ada pekerjaan tetap ada pendapatan atau mencari penghasilan sebagai sarana konsumsi maupun belanja untuk hidup dan tetap mengeluarkan pendapatan nya untuk retribusi maupun pajak. Idealnya PAD yang menjadi salah satu instrument dalam APBD dapat menciptakan lapangan kerja serta dapat menurunkan tingkat kemiskinan sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, pertama Pembangunan Ekonomi yang diukur dari Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran berpengaruh secara signifkan terhadap Kemandirian Fiskal. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran meningkatkan

pendapatan yang selanjutnya meningkatkan kemandirian Fiskal. Tingkat pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, kenaikan pajak dan retribusi akan meningkat pendapatan asli dan daerah dan tingkat kemandirian fiskal. Begitu juga halnya dengan pengangguran Jawa Timur yang memiliki karakterstik bersifat temporer dimana secara sukarela menganggur untuk menunggu atau mencari pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi, peningkatan pengangguran tersebut tidak menurunkan tingkat pendapatan masyarakat yang berarti tidak mengurangi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sehingga tingkat kemandirian fiskal tidak menurun. Kedua, Kemiskinan mengurangi kemampuan masyarakat membayar pajak dan retribusi dan menurunkan pendapatan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka perlu saran yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran. Berikut saran yang diberikan. Pertama, pengendalian kemiskinan atau strategi penggurangan kemiskinan diperlukan agar tidak menurunkan tingkat PAD dan Kemandirian Fiskal. Pengendalian kemiskinan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur sangat diperlukan agar tetap menjaga atau menurunkan tingkat kemiskinan dengan dengan upaya dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan manusia, menyediakan lapangan pekerjaan atau pengembangan usaha baik itu dari program pengembangan ekonomi kawasan maupun dari program pengembangan desa.

Kedua, menjaga Tingkat Pertumbuhan Ekonomi agar tingkat PAD dan Kemandirian Fiskal terus meningkat Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur terus terjadi peningkatan setiap tahunnya yang berhasil mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melakukan peningkatan asesibilitas pendidikan, kesehatan serta meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan prekonomian dibidang pertanian dan industri pada pusat-pusat pertumbuhan baru disetiap Kabupaten/Kota.

Ketiga, selain pajak dan retibusi daerah sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah juga harus menggali potensi lain misalnya dengan membentuk atau mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan lokal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.

Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Selemba Empat

Ardi Hamzah. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan : Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)*. Skripsi. Bangkalan

Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan,* Bagian penerbitan sekolah tinggi ekonomi YKPN. Yogyakarta.

Arikunto. S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Edisi Revisi. PT Rineka Cipta: Jakarta

Arsyad. L. 2010. *Ekonomi Pembangunan.* Yogyakarta, UPP STIM YKPN

Badan Pusat Statistik. Diunduh tahun 2017 di (*www.bps.go.id*)

Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Fadly, Faishal. 2016. *Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah?. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan,* Vol. 16, No 2 November. Universitas Brawijaya

Halim, A. 2001. *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Jhingan,M.L.2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*.Jakarta : Rajagrafindo

Kifliansyah. 2001. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN

Kuncoro. M. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik. Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga

Manning, Chris dan Tanjoedin Noer Effendi. 1985. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Gramedia

M.P. Todaro. 2002. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga,* Edisi 4. Jakarta. Erlangga

Nasir. M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nirzawan. 2001. *Tinjauan umum terhadap system pengelolaan keuangan daerah di Bengkulu Utara,* Manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: UPP YKPN

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permata. S. 2011. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Tenaga Kerja, dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Bogor.

Putong. I. 2003. *Pengantar ekonomi Mikro dan Makro*. Edisi II. Jakarta: Ghalia Indonesia

Prasetyo. A. 2011. *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Dilihat dari rasio Pendapatan Daerah pada APBD 2006-2008*. Skripsi. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Rahmawati, A. 2010. *Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada kpp pma lima Jakarta tahun 2007-2008*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Sadono. S. 2000. Ekonomi Pembangunan. *Proses, Masalah dan dasar Kebijakan Pembangunan*. UI-Press. Jakarta.

Siregar, 2006. *Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi : Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja, Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan, INDEF*. Jakarta

Sukirno. S. 2004. *Pengantar Ekonomi Makro Ekonomi*. Yogyakarta. Raja Grafindo Persada

Suryana. 2000. *Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi Pembangunan*: Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik. Untuk Keuangan dan pembangunan daerah*. Andi. Yogyakarta

Sugiyono. 2004. *Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Keenam*, Alfabeta: Bandung

Subana. M.S. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia

Todaro. M. dan Smith. 2010. *Pembangunan Ekonomi*: Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga

UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan UU No. 28 Tahun 2009

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan UU No. 28 Tahun 2009

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Waluyo. S. 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*

Wulandari, A. 2001. *Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol. 5. No. 2. November

Widarjono. A. 2009. *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. EKONISIA

Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN

Zulyanto. A. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Tesis*. Program Study Magister Ilmu Ekonomi dan Study Pembangunan: Semarang